

OPTIMASI PEMBANGUNAN DESA: Kajian Kemampuan Manajemen Kepala Desa di Malalanda Buton Utara

Ninik Endang Purwati¹, La Agus Said², Selmieta³

Universitas Halu Oleo

Correspondent author: ninikendangpurwati62@gmail.com

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

The purpose of this research is to evaluate the village chief's managerial skills in carrying out village development (a study in Malalanda village, Kulisusu District, North Buton Regency). A qualitative descriptive research methodology including observation, interview, and documentation was applied in this study. The findings of this research suggest that the Malalanda village head utilizes four (four) management roles to govern village development. Planning is the first. Holding village development meetings (musrembang) with the community is the first step in the development process in Malalanda village. Next, arrange. The village chief put together a special team to rebuild the community's development plans based on the outcomes of the development planning meeting with them. Finally, actuating. The Malalanda village chief led the locals or village authorities in putting development initiatives like intercommunal cooperation and community service into action. And finally, oversight. The village chief of Malalanda often makes direct visits to the sites of activities in order to monitor and oversee the performance of local authorities as they execute development.

Keywords: Development; Management; Optimization; Village head

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan manajerial kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa (studi di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara). Metodologi penelitian deskriptif kualitatif yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa Malalanda menggunakan empat (4) peran manajemen untuk mengatur pembangunan desa. Perencanaan adalah yang pertama. Mengadakan musyawarah pembangunan desa (musrembang) dengan masyarakat merupakan langkah awal dalam proses pembangunan di desa Malalanda. Selanjutnya, pengorganisasian. Kepala desa membentuk tim khusus untuk menyusun kembali rencana pembangunan desa berdasarkan hasil musrembang bersama masyarakat. Terakhir, penggerakan. Kepala Desa Malalanda memimpin warga atau pemerintah desa dalam menjalankan inisiatif pembangunan seperti kerja sama antarwarga dan kerja bakti. Dan terakhir, pengawasan. Kepala Desa Malalanda sering melakukan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kata Kunci: Optimalisasi; Manajemen; Pembangunan; Kepala Desa

PENDAHULUAN

Sama halnya dengan modernitas, kata "pembangunan" tidak memiliki definisi yang umum. Selain itu, modernisasi paradigma atau pola pikir masyarakat adalah tujuan dari pembangunan. Menurutnya, sebuah bangsa harus melalui sebuah proses untuk mencapai tujuannya, yang merupakan inti dari apa itu pembangunan (Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih, 2014:44).

Tujuan dasar dari pembangunan adalah untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Namun, sering kali inisiatif dan tindakan yang bermaksud baik ini tidak menjangkau semua daerah, terutama daerah pedesaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan di daerah perkotaan lebih terkonsentrasi daripada di daerah pedesaan.

Pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial pada dasarnya dicapai melalui pembangunan desa, yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan bantuan timbal balik. Pengelolaan yang sistematis adalah kunci untuk mencapai hasil pembangunan yang terbaik, mulai dari tahap perencanaan hingga akhir pembangunan. Luasnya cakupan perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup masalah geografis, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan fisik, membutuhkan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah melibatkan tim perencana yang memiliki pengetahuan tentang berbagai bidang yang relevan, termasuk sosiologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, dan pemerintahan (Sjafrizal, 2016:15).

Rencana pembangunan kabupaten/kota dikutip dalam rencana pembangunan desa. Sebagai satu-satunya dokumen perencanaan di desa, rencana pembangunan desa menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Struktur kegiatan yang terarah, terencana dan terprogram secara mendetail, hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh kemampuan individu kepala desa yang bersifat terbuka dan transparan, tidak memihak bagi kepentingan kelompok atau golongan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tingkat optimal/kesuksesan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berlakunya UU No. 12 Tahun 2015 mengenai desa, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap masyarakat di desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan daerah secara berkesinambungan dan terpadu dibawah koordinasi dan fasilitasi pemerintah dari pusat sampai daerah. Dengan demikian peran dan kedudukan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan menjadi lebih besar.

Selain itu, prinsip keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan biaya dan keuangan negara oleh pemerintah dari pusat hingga ke daerah harus dapat dilakukan oleh para

penentu kebijakan (stake holder) di daerah, sehingga amanah dan ide yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2015 mengenai PEMDA dan UU No 34 Tahun 2015 mengenai Perimbangan Keuangan serta UU No 12 Tahun 2015 mengenai Desa, hakikatnya mampu diimplementasikan dengan optimal.

Hasil pengamatan di desa Malalanda penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemerintahan belum mengarah terhadap prinsip-prinsip manajemen yang baik, masyarakat belum mendapatkan peran yang sesuai dengan keadaan mereka atau porsi dan peran masing-masing masyarakat dari pembangunan pemerintahan. Kemudian partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan mulai dari perencanaan, penggerakkan hingga pengawasan masih kurang. Untuk itu kemampuan manajemen kepala desa masih kurang dalam melaksanakan pembangunan dan melibatkan partisipasi masyarakat juga masih rendah.

Pada umumnya, kegagalan atau keberhasilan kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di desa terutama disebabkan karena kepala desa belum dapat mengoptimalkan pendekatan manajerial kepemimpinan kepada setiap aktivitas kebijakan yang dijalankannya. Tugas seorang kepala desa sangat penting karena ia adalah otoritas tertinggi di masyarakat, berwenang untuk membuat pilihan-pilihan penting, dan bertanggung jawab untuk memimpin, mengakomodasi ambisi masyarakat, dan mengayomi masyarakat agar dapat berkolaborasi dalam pembangunan. Dengan demikian, aspek manajerial dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kepala desa hanya dapat bernilai baik apabila bersifat terbuka dan memperhatikan seluruh aspirasi dan kepentingan yang ada dalam desanya.

Kepala desa memainkan peran penting dalam melaksanakan pembangunan desa karena mereka adalah pemimpin desa dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Posisi kepala desa adalah yang tertinggi di masyarakat, dan dengan demikian, ia memiliki wewenang untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam melaksanakan inisiatif pembangunan. Kemajuan suatu desa membutuhkan seorang manajer untuk pemerintahan yang mampu mengelola pembangunan desa dan aparatur desa. Berdasarkan informasi yang sering di dengar bahwasannya pembangunan di desa malalanda masih kurang dan masih sering tertunda, karena kurangnya lahan yang tersedia. Hal ini dapat di lihat bahwa betapa lemahnya kemampuan manajerial kepala desa untuk mengimplementasikan pembangunan desa tidak begitu optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan manajemen Kepala Desa Malalanda dalam melaksanakan pembangunan desa dan mengetahui unsur-unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembangunan desa.

Ilmu dan seni yang mengkoordinasikan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu sering disebut sebagai manajemen. G.R. Terry (dalam Sukarna, 2011), yang dikenal dengan POAC, membuat daftar tugas-tugas manajerial yang harus dilakukan dalam sebuah organisasi sebagai berikut;

Rencana adalah kumpulan tindakan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai serangkaian tujuan. Perencanaan diikuti oleh tahap pengorganisasian. Oleh karena itu, manajer harus mengetahui prinsip-prinsip organisasi dan jenis-jenis wewenang yang dapat dan tidak dapat diberikan. Berbeda dengan tiga peran lainnya dalam proses manajemen, pergerakan merupakan langkah yang sangat penting (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan). Fungsi manajemen yang terakhir, pengawasan, memiliki dampak yang besar pada seberapa baik kegiatan manajemen lainnya dilakukan karena fungsi ini menentukan apakah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak.

Elemen-elemen dari manajemen terdiri dari 6M yakni Manusia (*man*), Money (*uang*), Methods (*metode*), Material (*bahan*), Machines (*mesin*), dan Market (*pasar*).

Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa dan badan perwakilan desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten lamongan nomor 34 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Pemerintah desa dan badan perwakilan desa pada dasarnya adalah dua struktur penting yang mengelola pemerintahan desa. Kepala desa dan perwakilan lokal disebut sebagai pemerintah desa. Kepala desa adalah alat dari pemerintah desa, yang berfungsi dalam kapasitas yang sama dengan badan permusyawaratan untuk masyarakat.

Pada intinya, pengembangan didefinisikan sebagai proses perubahan yang berkelanjutan yang mengarah pada keadaan yang lebih baik berdasarkan standar yang telah ditentukan. Ada beberapa definisi pembangunan yang diberikan oleh para ahli, beserta perencanaannya. Definisi "pembangunan" bervariasi dari satu orang ke orang lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dan dari satu negara ke negara lain. Namun, ada konsensus universal bahwa pembangunan adalah proses mengubah dunia (Tjokrowinto, 2007:15). Ruang lingkup kajian penelitian meliputi a) Kemampuan manajemen Kepala desa dengan alat ukur mengkaji perencanaan, pengorganisasi, pergerakan dan pengawasan; b) indikator kajian pelaksanaan pembangunan dengan mengkaji implementasi pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Abdullah, 2015, hlm. 220). Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lexy J. Melong (2016) Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan Informan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Malalanda, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa Malalanda, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Ketua BPD, dan tiga orang anggota masyarakat yang memahami substansi permasalahan. Baik data primer maupun sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, metode lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). Kondensasi data merujuk pada proses seleksi, fokus studi, penyederhanaan, ringkasan dan transformasi data dengan tujuan untuk mengetahui Optimasi Pembangunan Desa melalui Kajian Kemampuan Manajemen Kepala Desa di Malalanda Buton Utara. (Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Manajemen Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Desa

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan dalam penelitian ini yaitu melibatkan bagaimana perencanaan serta proses penyetujuan usulan program pembangunan desa yang diusulkan oleh masyarakat dan pemerintah desa bersedia untuk mengelolah atau memeproses usulan pembangunna tersebut.

Proses perencanaan pembangunan di Desa Malalanda dimulai dengan diadakannya musyawarah pembangunan desa (MUSREMBANG) dalam rangka pembahasan pembangunan di desa malalanda. Dalam musyawarah pembangunan desa aparat desa dan masyarakat selalu dilibatkan. Musyawarah pembangunan desa dilakukan untuk mengetahui usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa malalanda. Setelah dilaksanakannya musyawarah pembangunan desa tersebut maka

pemerintah desa malalanda membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat, pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah di sepakati pada musyawarah pembangunan desa (MUSREMBANG). Tujuan di adakannya tim ini yaitu agar pembangunan yang dilaksanakan di desa malalanda lebih terarah dengan tujuan yang telah di sepakati dan guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa malalanda. RKP Desa melibatkan unsur- unsur seperti Kepala Desa, kepala urusan perencanaan, semua aparat desa dan bahkan BPD dilibatkan juga.

Kalimat di atas sama seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Malalanda mengatakan bahwa :

"Aparat desa dan masyarakat selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Kami melakukan musyawarah pembangunan desa (MUSREMBANG) setiap tahunnya. Setelah kami melakukan musyawarah bersama masyarakat dan mendapatkan keputusan bersama, kami juga membentuk sebuah tim RKP Desa untuk membantu dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa dalam rangka menyejahterakan masyarakat" (wawancara Senin, 10 Oktober 2022, Kepala Desa Malalanda).

Berdasarkan wawancara dan juga observasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa kemampuan manajemen kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa di desa malalanda langkah awal yang dilakukan adalah melakukan perencanaan pembangunan desa yang dilakukan bersama masyarakat. Cara pemerintah desa melakukan dengan perencanaan pembangunan desa dengan musyawarah pembangunan desa (MUSREMBANG), dengan hasil yang didapatkan dari musyawarah tersebut di susun kembali oleh tim khusus yang dibentuk untuk menyusun kembali keputusan bersama tentang perencanaan pembangunan. Usulan-usulan yang di sampaikan oleh masyarakat tidak semuanya dijalankan oleh pemerintah desa tetapi dipilih lagi yang mana yang merupakan usulan yang dapat diprioritaskan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan menurut kemampuan dan keahlian dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan program pembangunan desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu pembangunan di desa tergantung bagaimana kepala desa mengatur dan memanager pelaksanaan pembangunan tersebut. dengan demikian kemampuan manajemen kepala dalam melaksanakan pembangunan desa sangat diperlukan guna tercapainya program-program pembangunan yang telah ditentukan. Seperti yang yang di ungkapkanoleh kepala desa mengatakan :

"Kalau untuk pengorganisasian, biasanya dibentuk setelah adanya program-program pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat dalam rapat musyawarah pembangunan desa. Tapi memang sebelumnya sudah ada untuk struktur organisasi di desa. Dalam melaksanakan pembangunan bukan hanya tugas saya sebagai kepala desa akan tetapi juga termasuk tugas dari tim pengelola kegiatan pembangunan, yang di bawah langsung oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) dan yang di koordinasi langsung oleh sekretaris desa. Jadi, tugas tim pengelola tersebut menjalankan, mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan dari program pembangunan yang terjadi dilapangan. Setelah mereka menjalankan tugas mereka tersebut mereka langsung melaporkan hasil dari kegiatan lapangan tadi, saya juga sebagai kepala desa tidak lupa untuk meninjau langsung kelapangan." (hasil wawancara Senin, 10 Oktober 2022, Kepala Desa Malalanda Bapak Samudji).

Berdasarkan wawancara serta observasi yang dilakukan, maka didapatkan bahwa kemampuan kepala desa malalanda dalam mengorganisasikan pelaksanaan program pembangunan di desa malalanda, kepala desa melakukan sistem bagi tugas dengan membentuk tim pelaksana kagiatan untuk melaksanakan program kerja dilapangan yang terdiri dari pemerintah desa itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan program pembangunan tersebut yang dananya bersumber dari APBD dilakukan oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD). Tim pelaksana kegiatan terdiri dari lima sampai dengan 8 orang yang dibawah langsung oleh PTPKD yang di koordinatoring oleh sekretaris desa. Tugas tim pelaksana kegiatan yaitu menjalankan, mengawasi dan melaporkan hasil program kerja pembangunan dilapangan.

c. Penggerakkan

Penggerakkan merupakan suatu usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan keinginan atau kemauan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan atau yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di sepakati sebelumnya. Dalam sebuah desa kedudukan tertinggi di pegang oleh kepala desa yang bertugas menggerakkan atau mengarahkan masyarakat desa untuk melaksanakan tugas yang telah di rencanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini penggerakkan merupakan cara kepala desa dalam mengatur masyarakatnya untuk melaksanakan tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunna di desa malalanda kepala desa selalu mengarahkan masyarakat dan mengawasi tim pelaksana

kegiatan. Cara kepala desa dalam mengarahkan masyarakatnya untuk melaksanakan pembangunan dilakukan seperti melaksanakan gotong royong, kerja bakti dan melaksanakan program jumat bersih. Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat desa Malalanda :

" Kami ini masyarakat selalu melakukan gotong royong apabila diberitahukan bahwa akan ada gotong royong. Kepala desa juga selalu melaksanakan gotong royong bersama masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa "(hasil wawancara Minggu, 16 Oktober 2022, Masyarakat Desa Malalanda, Bapak Suhardin)."

Dari ungkapan tersebut, maka dapat diketahui bahwa cara kepala desa dalam menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yaitu dengan melaksanakan gotong royong sebelum dilaksanakannya pembangunan. Tim Pelaksana Kegiatan selalu digerakkan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dalam desa. Setiap pelaksanaan pembangunan dalam desa, pembangunna tersebut dipantau langsung oleh kepala desa secara langsung.

Hasil penelitian di Desa Malalanda, sebelum dilaksanakannya pembangunan kepala desa selaku pimpinan dalam desa menggerakkan masyarakat Desa Malalanda untuk melaksanakan kerja bakti, gotong royong dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar dalam proses pelaksanaan pembangunan dapat mempermudah proses pembangunan. Bahkan bukan hanya masyarakat yang diarahkan/digerakkan tetapi juga aparat desa khususnya tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tupoksi mereka masing-masing. Serta kepala desa juga melakukan peninjauan secara langsung dilapangan.

d. Pengawasan

Pengawasan yaitu mengawasi kinerja aparat apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan atau belum, tanpa ada kesalahan apapun yang dilakukan. Dalam proses pembangunan dalam desa pengawasan sering dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan pada saat sedang dikerjakan. Fungsi manajemen dalam hal ini pengawasan sangat diperlukan, fungsi ini dilakukan oleh atasan secara benar agar menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaiki jika terdapat kesalahan atas hasil kerja aparatnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dalam desa malalanda, kemampuan mengawasi yang dimiliki oleh kepala desa sangat diperlukan dalam pembangunan. Cara kepala desa malalanda mengawasi hasil kerja yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan yaitu dengan cara mengawasi secara langsung terhadap

setiap program pembangunannya yang dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh sekretaris desa malalanda, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu memantau sendiri dilapangan. Pemantauan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa (hasil wawancara Selasa 11 Oktober 2022, Sekretaris Desa Malalanda Bapak Yasmin).”

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kepala desa dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu pengawasan dalam desa malalanda sangat dilakukan dengan baik. Kepala desa melakukan pengawasan secara langsung kelapangan untuk memantau pembangunannya yang dikerjakan. Pengawasan juga merupakan tindakan akhir dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini kepala desa malalanda sudah melaksanakan fungsi manajemen tersebut dengan baik dengan mengawasi secara langsung bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan.

Hasil penelitian di Desa Malalanda, dalam melaksanakan langkah terakhir dalam prinsip manajemen yaitu pengawasan kepala desa menggunakan teknik peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kinerja tim pelaksana kegiatan yang telah diberikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan Dalam Desa Malalanda

a. Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan pembangunan yang dirasakan langsung oleh semua masyarakat. Pembangunan yang dimaksud tersebut adalah pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya untuk dilaksanakan. Pembangunan dalam bidang fisik ini merupakan realisasi dari pembangunan yang telah dihasilkan sebelumnya. Pembangunan yang dilaksanakan yaitu kerja bakti yang dilaksanakan setiap jumat sore, pembuatan lapangan bola, jalan tani yang di biayai ADD dan penimbunan talut. Adapun tabel pembangunan fisik di desa malalanda yaitu :

Tabel 1. Pembangunan fisik Desa Malalanda

No	Jenis Kegiatan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		
		Volume	Jumlah (Rp)	Sumber
1	Penimbunan Perkuburan Umum (TPU)	95 m	150.000.000	ADD
2	Penimbunan Talut	62 m	142.000.000	ADD
3	Jalan Usaha Tani	175 m	180.000.000	ADD

Sumber: data diolah 2022

Tabel diatas merupakan jenis kegiatan yang dilaksanakan dalmaa bidang fisik. Adapun kepala desa malalanda mengatakan:

“Apa yang direncanakan sebelumnya, hampir dilaksanakan semua. Kami memperhatikan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang

menjadi prioritas kami dalam melaksanakan pembangunan. Biasanya juga ada pembangunan yang mendesak seperti penimbunan talut (hasil wawancara 14 Oktober, kepala bidang perencanaan Bapak Laode Isman Miatan,S.Pd)".

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa data tersebut memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa malalanda merupakan perencanaan program pembangunan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dilapangan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pelaksanaan pembangunan fisik berupa penimbunan perkuburan umum (TPU), penimbunan talut, dan jalan usaha tani. Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan perwujudan dari hasil perencanaan yang dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa malalanda secara langsung berdampak pada organisasi penanggung jawab kegiatan baik dari tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik yaitu pembangunan yang dilaksanakan dan hasil dari pembangunan itu tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam pembangunan non fisik di desa malalanda masyarakat selalu dilibatkan seperti pelatihan perikanan, sosialisasi kesehatan, peningkatan kualitas aparat mesjid. Kaitannya dengan pembangunan non fisik ini peneliti memaparkan hasil wawancara bersama kepala urusan perencanaan yaitu

"Pembangunan non fisik yang dilaksanakan di desa ini yaitu pelatihan perikanan,sosialisasi kesehatan, peningkatan kualitas aparat mesjid. Pelatihan perikanan ini sering sekali dilakukan di desa malalanda ini, mungkin karena mayoritas penduduk disini mata pencahariannya adalah nelayan. Pelatihan ini juga terkadang dilakukan di hotel-hotel yang ada di ereke itu (hasil wawancara Selasa 11 Oktober 2022, kepala urusan perencanaan, Bapak La Ode Isman Miatan,S.Pd)".

Dari hasil wawancara bersama kepala urusan perencanaan dan masyarakat desa malalanda maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembangunan secara non fisik di desa malalanda masyarakat dilibatkan demi kelancaran pembangunan tersebut. pembangunan yang dilakukan dalam desa malalanda yaitu pelatihan perikanan, sosialisasi kesehatan, dan peningkatan kualitas aparat mesjid. Pembangunan tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan sosial budaya mendapat dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan tersebut. dengan demikian Kemampuan Manajemen Kepala Desa, berhasil memberikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajemen kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa di Desa Malalanda dimulai dari perencanaan, melibatkan musrembang untuk mengumpulkan usulan masyarakat. Proses organisasi melibatkan tim khusus dan aparat desa, termasuk tim pelaksana dan tim pengelola kegiatan. Kemampuan menggerakkan terlihat dari arahan kepala desa kepada aparat desa dan masyarakat. Dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, kepala desa melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

Faktor pendukung melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kerja bakti dan peran kepala desa dalam mengarahkan. Namun, ada faktor penghambat, yaitu pembebasan lahan. Untuk mencapai sasaran maksimal, perlu menjaga hubungan yang baik antara kepala desa, aparat desa, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan penting, dan pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama terkait pembebasan lahan.

REFERENSI

- Abdi, R. B., Liatyaningsih, L., & Stiawati, T. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Abdul, K. (2019). pengaruh kemampuan manajerial kepala desa terhadap kinerja perangkat desa pada kantor desa doru. o' kecamatan langgudu kabupaten bima.
- Awaluddin, & Hendra. (2018). Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia*, 2(1), 1–12.
- baharuddin, R. (2010). Keefektifan Media Belajar Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Tdris*, 5(1), 112-127.
- Burhanuddin. (1994). Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Candra, W. (2016). dasar-dasar manajemen (S. Syarbaini (ed.)). kelompok penerbit perdana Mulya Sarana.
- Dedi, M. (n.d.). Fakto-faktor Manajerial dalam pengelolaan usaha penggilingan padi. CV. MEDIA SAINS Indonesia.
- Dwiyanto, A. (2004). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerdi, Pusat Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Peraturan Desa*, 2(1), 40–50.
- Effendi, U. etc. (2014). Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3. 19. Asas Manajemen, 23–77.
- Fathoni, M., Suryadi, & Rengu, S. P. (n.d.). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 139–146.
- Handoko T. Hani, 2000, manajemen personalia dan sumber daya manusia, Edisi II, Cetak Keempat Belas, Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Hasibuan, S.P. Malayu, (2014), manajemen sumber daya manusia, PT bumi aksara.

Hasibuan, S.P. Malayu. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, cetakan II. Jakarta, PT Toko Gunung Agung.

Kristianto, S. (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pemembrdayaan Masyarakat Di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Fakultas ..., 32. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/12/Jurnal IP Sony Kristianto \(12-31-13-12-24-44\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/12/Jurnal IP Sony Kristianto (12-31-13-12-24-44).pdf)

Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONawe. *Journal Publicuho*, 5(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130>

MUHAMMAD, A. (2017). PENGARUH BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN, DAN KOMITMEN KERJA TERHADAP KINERJA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BERDASARKAN PELABUHAN BEBAS (BPKS). 1.

Munthe mondang. (n.d.). faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kurikulum ditinjau dari sudut manajerial. Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 14.

PARNATA, I. G. L. T. (2019). Musyawarah desa dalam perencanaan pembangunan desa (U. Jasnety (ed.)).

R. Terry, George, 2009, dasar-dasar manajemen, PT bumi aksara.

Ramdanil, M. (2019). pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam peningkatan mutu lembaga pendidikan islam. XIII.

Tabrani, R. (2018). membangun efektivitas kinerja kepala desa (N. Syamsiah (ed.)).

Terry, GR. (2006), Asas-asas Manajemen, Alih Bahasa Oleh Winardi, PT. Alumni Bandung.

Sukaaro, W. (2017). Kemampuan Manajerial Kepala Desa Dalam Keberhasilan Pembangunan Desa Di Desa Hilibadalu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat. *Jam Pembnas*, 1 (1), 1–7. <https://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/view/7>.

Sukarna, (2011). Dasar-dasar Manajemen. CV. Mandar Maju: Bandung.

UU NO 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa

UUN NO 34 Tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan UU NO 12 Tahun 2015 tentang Desa.

UU NO 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU NO 6 Tahun 2006 tentang Desa dan Peraturan Terkait.

Usep, S. (n.d.). ekonomi manajerial (Dewi puspa). Grup Penerbit CV Budi Utama. Wijayanti, I. D. S. (2014). Manajemen. Yogyakarta. Mitra Cendikia.

Winda. (2013). Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan. *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan Dan Kearsipan*, 01 (9), 15–71.

Yusdi, M. (2010). Kemampuan Kecakapan. Jakarta: EMK.